HARIAN BORNEO

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2015 | Hal. : 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BPK Periksa SKPD Kapuas Hulu

Andreas
Harian Borneo, *Putussibau*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat melakukan audit terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu. Hal tersebut disampaikan kepala Inspektorat Kapuas Hulu Drs H Syafaruddin MM di Putussibau, Rabu (20/5)

Audit tersebut fokus pada penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu tahun anggaran 2014. "Audit yang dilakukan ingin melihat secara keseluruhan mulai dari keuangan, belanja modal, pendapatan serta aset," ujar Syafaruddin

Ditambahkannya, waktu yang dibutuhkan untuk audit SKPD Kapuas Hulu selama 30 hari, dengan lima petugas dari BPK

Audit sudah berlangsung sekitar dua minggu itu menyasar semua dinas termasuk inspektorat.

Dikatakan Syafaruddin, selama proses audit, BPKP didampingi dan difasilitasi oleh Inspektorat Kapuas Hulu."Seperti pemanggilan SKPD atau pengambilan data ke kantor-kantor, kami juga yang membantu mereka. Pemeriksaan tersebut juga masuk ke Kecamatan di Kapuas Hulu dengan dibantu inspektorat kabupaten," papar di

Dijelaskannya, sebelum audit BPK, Inspektorat Kapuas Hulu terlebih dahulu melakukan review laporan keuangan seluruh SKPD yang ada. "Review itulah sebagai dasar audit BPK Kalbar. Dari review memang sudah terlihat keuangan SKPD sudah bagus, cuma kendala ada pada aset. Aset yang bertahun-tahun lalu, sebelum periode Bupati AM Nasir yang memimpin," paparnya

Menurut Syafaruddin, selama proses pemeriksaan dimulai hingga sekarang tidak ada hambatan, karena Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH telah mengeluarkan edaran supaya seluruh kepala SKPD tidak keluar daerah. "Kami himbau agar surat edaran dari Bupati itu ditaati seluruh SKPD. Ini demi kelancara pelayanan terhadap tim audit," pungkasnya